

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pemimpin menurut Kartono (2006) ialah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Banyak kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Menurut Duncan (dalam Aryani, 2012) sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki dan membangun sebuah kompetensi, sehingga dapat dipercaya oleh pengikutnya. Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin, diantaranya adalah kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi strategi, dan kompetensi etika.

Selain memiliki kompetensi, seorang pemimpin juga harus memiliki integritas yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, yang ditujukan kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian BUMN.

Sebelum menjalankan tugasnya, seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan harus menandatangani fakta integritas untuk menunjukkan komitmen akan

menjalankan dan mengelola pemerintahan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel guna menekan tingkat penyimpangan, termasuk tindakan yang koruptif (Zahra, 2011).

Berdasarkan Undang-undang dasar Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Menurut Hakim (dalam Zahra, 2008) isi fakta Integritas adalah: konsekuensi dan konsisten dengan komitmen, menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan dan ada kesamaan pemahaman tentang fakta integritas, bersedia dipantau organisasi yang partisipatif dan independen serta memberikan *punishment* dan *reward* yang objektif.

Tidak cukup dengan penandatanganan fakta integritas, tetapi yang paling penting adalah penerapannya di lapangan harus benar-benar dilaksanakan. Integritas adalah jujur dan dapat dipercaya, selain harus dilaksanakan dengan komplit juga harus bersedia dikontrol pelaksanaannya oleh unsur lain yang telah diberi kewenangan. Untuk itu sebaiknya siap untuk menerima masukan atau kritikan yang membangun dari pihak-pihak yang mempunyai komitmen yang sama, sehingga makna penandatanganan bukan hanya formalitas belaka karena integritas merupakan salah satu dimensi dari kepercayaan.

Ncube (2011) dalam penelitiannya di Zimbabwe, ia menemukan krisis kepercayaan yang terjadi di Zimbabwe pasca reformasi kolonial administrasi pemerintahan ialah ketika pemimpin mereka tidak bisa menjalankan tanggung

jawabnya sebagai seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan, bahwa pemimpin juga dituntut memiliki tanggung jawab agar masyarakat mempercayainya.

Kepercayaan merupakan atribut utama yang dikaitkan dengan kepemimpinan. Jika kepercayaan ini luntur, dampaknya bisa serius terhadap kinerja kelompok (Robbin dan Judge, 2008). Dimensi penting yang mendasari konsep kepercayaan ada lima dimensi yaitu; integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas (kesetiaan) dan keterbukaan.

Menurut Zahra (2011) integritas didukung oleh enam pilar karakter yang terdiri dari kejujuran, keadilan, kepedulian, kearifan, hemat, dan tanggung jawab. Dari keenam pilar integritas tersebut, kepedulian merupakan kunci dalam menyelesaikan masalah integritas bangsa pada umumnya dan perusahaan khususnya.

Seorang yang berperan sebagai pemimpin dalam organisasi yang mempunyai bawahan, tentu saja menginginkan bawahannya memiliki integritas, kompetensi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya kepada pemimpinnya begitu juga sebaliknya pemimpin harus memiliki integritas, kompetensi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya sebagai seorang pemimpin. Apabila pemimpin dan bawahan mempunyai integritas, kompetensi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, maka akan menimbulkan kepercayaan kedua belah pihak (Zahra, 2012).

Saling percaya antara pemimpin dan bawahan akan dapat meningkatkan kinerja dan suasana kerja yang kondusif. Begitupun halnya dengan pemimpin pemerintahan yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, tentu juga akan menimbulkan rasa saling percaya antara pemimpin dan masyarakat, sehingga

pemimpin dapat bekerja dengan tenang karena telah mendapat kepercayaan yang penuh dari masyarakat.

Pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang mempunyai integritas, kompetensi, dan loyalitas yang tinggi terhadap bawahan dan juga terhadap pekerjaannya serta dipercaya oleh bawahannya. Pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi biasanya memiliki sikap jujur menjaga komitmen dan berperilaku konsisten.

Menurut Wirawan (dalam Zahra, 2008) integritas mutlak diperlukan dalam kepemimpinan. Orang dengan skor dapat dipercaya tinggi cenderung untuk mencapai prestasi yang terencana dan bekerja keras, jarang mengalami kesulitan. Orang yang berskor rendah tidak terorganisir, tidak dapat dipercaya dan sering menyerah jika menghadapi tantangan.

Pada saat sekarang ini, dapat kita lihat diberbagai media massa, yang disorot oleh berbagai program berita adalah kinerja para pemimpin yang bersifat negatif, mulai dari pemimpin yang melakukan korupsi, tindakan asusila dan tindakan yang lainnya, sehingga jika kita hubungkan pada penjabaran keintegritasan seorang pemimpin sangat bertolak belakang sekali.

Kasus korupsi terus menyandera sejumlah pejabat pemerintahan. Hal ini menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat tersebut. Ini dibuktikan dalam survei yang dilakukan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada tanggal 6 hingga 19 Juli 2012. Sampel yang digunakan sebanyak 1.480 responden, *margin of error* kurang lebih 2,55% dan *confidence level*

95% dan tersebar di 32 provinsi (minus Papua) dengan metode tatap muka.

(<http://news.detik.com/read/2012/08/08/194049/1986685/10/survei-csismayoritas-pejabat-pemerintah-dinilai-korup>).

Sebanyak 77% publik menilai pejabat pemerintah mayoritas korupsi. Hanya 12% yang menilai korupsi dilakukan oleh sebagian kecil pejabat. Tidak hanya itu, sentimen negatif kepada pejabat pemerintah juga muncul ketika publik menilai apakah pemerintah tegas dan peduli terhadap mereka. Sebanyak 64 % publik menilai pemerintah tidak tegas mengambil keputusan. Sementara 57 % menilai pemerintah tidak peduli pada rakyat. Nilai yang cukup tinggi karena diatas 55 %.

Selain itu, berdasarkan survei *Global Corruption Barometer* (GBC) 2013 oleh *Transparency International Indonesia* (TII), khusus di Indonesia, pada kasus korupsi, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama (4,5%), diikuti peradilan (4,4%), partai politik (4,3%), pejabat publik (4%), bisnis (3,4%), kesehatan (3,3%), pendidikan (3,2%), militer (3,1%), LSM (2,8%), lembaga keagamaan (2,7%), dan media (2,4%). <http://www.pekanbaru.co/10935/survei-gbc-2013-kepolisian-dpr-lembaga-terkorup-di-indonesia-2/#>).

Adanya pemberitaan seperti itu tentu akan membawa pengaruh bagi pemikiran masyarakat terhadap kepercayaan terhadap pemimpin. Salah satunya mahasiswa, dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Sementara menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.

Mahasiswa sering disebut sebagai *agent of change* atau membawa perubahan dimasa yang akan datang, bahkan masyarakat memiliki harapan besar pada mahasiswa untuk berperan besar dalam upaya mencapai kemajuan negara, memiliki kesiapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan, dituntut untuk selalu kritis dan peka terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya (ketidakadilan, kesewenangan) oleh sebab itu mereka menginginkan adanya perubahan-perubahan dari hasil kinerja para pemimpinnya .

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti, bagaimanakah kepercayaan mahasiswa yang berdomisili di Riau terhadap pemimpin pemerintahan saat ini, terkait tercoretnya makna integritas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, dengan judul “kepercayaan mahasiswa terhadap pemimpin pemerintahan.”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimanakah kepercayaan mahasiswa pada pemimpin pemerintahan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seperti apakah kepercayaan mahasiswa terhadap pemimpin pemerintahan dengan menggunakan pendekatan *Indigenous Psychology*.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kepemimpinan telah banyak diteliti oleh para ahli, namun dengan pendekatan yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan *Indigenous Psychology*. Beberapa dosen di fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemimpin dengan menggunakan pendekatan *Indigenous Psychology*.

Aryani, Marettih, Cucuani, Susanti & Lestari (2012), dalam penelitian yang dilakukan terhadap 205 mahasiswa pada fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengenai kepercayaan terhadap pemimpin, didapatkan bahwa laki-laki maupun perempuan sebesar 67,8% dari total mahasiswa yang menjawab kuesioner sejumlah 205 mahasiswa mempercayai pemimpin karena integritasnya. Artinya integritas seorang pemimpin menjadi faktor penting sehingga mereka layak untuk dipercaya sebagai pemimpin.

Selain itu, Zahra (2011) juga melakukan penelitian terhadap karyawan PT.PUSRI sebanyak 108 karyawan, menghasilkan bahwa integritas kepemimpinan dan kompetensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepercayaan para bawahan pada PT.PUSRI.

Penelitian lain yang dilakukan Covey (2004) pada 54.000 orang sebagaimana dituliskan pada bukunya *The 8th Habit*. Kepada koresponden diminta untuk menyebutkan kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jawaban yang paling banyak diberikan adalah integritas. Dari hasil survey ini menjadi jelas

bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif maka pemimpin itu haruslah mengembangkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Gabarro (1978) melalui studi longitudinal yang dilakukannya terhadap manager perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun dengan fokus khusus pada “dasar kepercayaan”, menghasilkan bahwa dasar kepercayaan seseorang terhadap pemimpinnya adalah kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh pemimpinnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini hasilnya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, khususnya bagi para mahasiswa, agar bisa lebih kritis lagi dalam menilai kinerja para pemimpin.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu Psikologi dan juga sebagai *academic references*.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji permasalahan yang erat hubungannya dengan kepercayaan pada pemimpin dengan latar belakang yang berbeda.
4. Kemudian dapat lebih mengembangkan pembaharuan dalam metode penelitian, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Indigenous Psychology*.